

MODUL MATA KULIAH
PENGANTAR EKONOMI MAKRO



Penulis:

Dra. Ida Harahap, M.M.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan modul pengantar ekonomi makro ini.

Modul ini memaparkan tentang materi-materi pengantar ekonomi makro dan sudah disesuaikan dengan RPS, yang dipakai sebagai acuan dalam perkuliahan. Adapun tujuan penulisan modul ini adalah untuk mendukung proses pembelajaran materi perkuliahan dan memudahkan mahasiswa dalam memahami materi pengantar ekonomi makro.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat untuk setiap pembaca.

Jakarta, 7 Februari 2021

Dra. Ida Harahap, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
RUANG LINGKUP ANALISIS MAKROEKONOMI	1
1.1. Tujuan Pembelajaran.....	1
1.2. Uraian Materi	1
A. Pengertian Makroekonomi	1
B. Masalah Utama Dalam Perekonomian	1
C. Tujuan-Tujuan Kebijakan Makroekonomi.....	6
D. Bentuk-Bentuk Kebijakan Makroekonomi	8
1.3. Soal Latihan/Tugas.....	13
BAB 2.....	14
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL	14
2.1. Tujuan Pembelajaran.....	14
2.2. Uraian Materi	14
A. Pengertian Pendapatan Nasional	14
B. Tiga Cara Penghitungan Pendapatan Nasional	15
C. Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif.....	18
2.3. Soal Latihan/Tugas.....	21
BAB 3.....	23
PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI: PANDANGAN KLASIK, KEYNES DAN PENDEKATAN MASA KINI	23
3.1. Tujuan Pembelajaran.....	23
3.2. Uraian Materi	23
A. Pandangan Ahli Ekonomi Klasik	23
B. Kritik Keynes Terhadap Pandangan Klasik	25
C. Pendekatan Terkini Dalam Penentuan Kegiatan Perekonomian	27
3.3. Soal Latihan/Tugas.....	30
BAB 4.....	32
KESEIMBANGAN EKONOMI DUA SEKTOR.....	32
4.1. Tujuan Pembelajaran.....	32
4.2. Uraian Materi	32
A. Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor	32
B. Hubungan Antara Konsumsi Dan Pendapatan	33

C. Kecondongan Mengonsumsi dan Menabung	36
D. Fungsi Konsumsi Dan Fungsi Tabungan	37
E. Penentu-Penentu Lain Konsumsi Dan Tabungan.....	38
4.3. Soal Latihan/Tugas.....	39
BAB 5.....	40
KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR	40
5.1. Tujuan Pembelajaran.....	40
5.2. Uraian Materi	40
A. Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor.....	40
B. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan.....	41
C. Jenis-jenis Pajak	45
D. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan	45
E. Efek Pajak Ke Atas Konsumsi dan Tabungan.....	46
F. Pengeluaran Pemerintah.....	47
G. Masalah Makro Ekonomi dan Kebijakan Fiskal	48
5.3. Soal Latihan/Tugas.....	49
BAB 6.....	50
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TERBUKA	50
6.1. Tujuan Pembelajaran.....	50
6.2. Uraian Materi	50
A. Sirkulasi Aliran Pendapatan Ekonomi Terbuka	50
B. Syarat Keseimbangan Perekonomian Terbuka.....	53
C. Penentu Ekspor Dan Impor	56
6.3. Soal Latihan/Tugas.....	57
REFERENSI	58

BAB 1

RUANG LINGKUP ANALISIS MAKROEKONOMI

1.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami teori makro ekonomi dan ruang lingkup makroekonomi.

1.2. Uraian Materi

A. Pengertian Makroekonomi

Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan oleh Saleh (2015:3). Hubungan-hubungan kausal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregatif.

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz menyebutkan, makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting (*major macroeconomic issues*) dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari (2004:3). Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pembahasan di dalam makro ekonomi bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (menyeluruh) dalam perekonomian. antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

B. Masalah Utama Dalam Perekonomian

Menurut Sukirno, ada lima masalah utama di setiap negara dalam makroekonomi yaitu (2016:9):

1). Masalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk lingkup wilayah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, menurut Kalsum (2017:87) ada tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Setiap negara mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional, karena faktor-faktor produksi yang ada di negaranya akan bertambah dari satu periode ke periode lainnya. Akan tetapi, belum tentu ekonomi terus meningkat seperti yang diharapkan, karena adanya masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Masalah ekonomi ini bila tidak diperhatikan oleh pemerintah, dalam jangka panjang mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2). Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Adakalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut Konjungtor atau siklus kegiatan perusahaan (*business cycle*) (Sukirno, 2016:12).

Siklus dalam suatu periode konjungtor berbeda dengan keadaan konjungtor pada periode lain. Tetapi sifat-sifat dasar setiap siklus sama. Kurva konjungtur ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (*peak of wealth*), masa kemunduran, masa keterpurukan (*peak of crises*). Setelah krisis dapat teratasi, akan terjadi masa pemulihan (*recovery*), pertumbuhan, dan seterusnya.

3). Masalah pengangguran.

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur.

Terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin

banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial untuk yang mengalami. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Di samping itu, dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya untuk perekonomian dan masyarakat, dan harus secara terus-menerus dilakukan usaha dari pemerintah untuk mengatasinya.

4). Masalah kenaikan harga (inflasi).

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah-yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun.

Akibat buruk inflasi yaitu menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

5). Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri.

Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut.

Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta

asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru.

C. Tujuan-Tujuan Kebijakan Makroekonomi

Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno, menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan lima aspek, yaitu (2016:22):

1). Menstabilkan Kegiatan ekonomi;

Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan, tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga dan kestabilan neraca pembayaran.

2). Mencapai Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja (Kesempatan Kerja) Penuh Tanpa Inflasi;

Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya, yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai.

3). Menghindari Masalah Inflasi;

Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tetapi sering kali, inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu.

4). Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Teguh;

Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.

5). Mewujudkan Kekukuhan Neraca Pembayaran Dan Kurs Valuta Asing.

Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997-1999 merupakan pengalaman pahit, yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat dan kondisi sebaliknya daya beli riil masyarakat merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan

ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi harus memperhatikan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya.

D. Bentuk-Bentuk Kebijakan Makroekonomi

1). Kebijakan Fiskal;

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah-untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) berawal di Wuhan, Tiongkok dan dengan dengan cepat menjadi permasalahan global, mendorong WHO menyatakan status pandemi pada 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil berbagai langkah luar biasa (*extraordinary*) untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah Covid-19. Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah untuk menghadapi pandemi. Presiden RI telah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN di tahun 2020 fokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan.

Kebijakan fiskal yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020:14), adalah dengan memberikan tiga stimulus, yakni:

a). Stimulus 1 senilai Rp8,5 triliun

Di akhir Februari 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi senilai Rp8,5 triliun yang secara khusus diarahkan ada percepatan belanja khususnya bantuan sosial dan belanja modal, mendorong sektor padat karya, perluasan kartu sembako serta insentif untuk sektor pariwisata sebagai sektor terdampak.

b). Stimulus 2 senilai Rp22,5 triliun

Pada 13 Maret 2020, Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ke-2 yang fokus pada penyediaan insentif pajak senilai Rp22,5 triliun untuk periode April hingga September 2020. Pemerintah juga menyediakan dukungan non-fiskal dalam rangka memperlancar ekspor dan impor pada sektor dan komoditas tertentu. Di samping itu, Pemerintah

telah melakukan penghematan, *refocusing* kegiatan, serta realokasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk penanganan COVID-19. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19.

c). Stimulus 3 senilai Rp405,1 triliun

Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Di dalamnya termasuk penyediaan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalisasi oleh otoritas untuk menangani COVID-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

2). Kebijakan Moneter;

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah-yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia)-untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan.

Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter pemerintah dapat menambah penawaran uang. *Ceteris paribus*, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi, langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi.

Kebijakan moneter dan keuangan dalam menangani Covid-19 dan mitigasi dampak ekonomi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020:14), sebagai berikut:

- a) Bidang Moneter
 - i. Menurunkan suku bunga BI *seven days Repo Rate*;
 - ii. Meningkatkan intensitas *triple intervention*;
 - iii. Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas;

- iv. Memperpanjang tenor SBN;
 - v. Memperluas jenis *underlying* transaksi;
 - vi. Melonggarkan ketentuan RIM;
 - vii. Menyediakan uang higienis, dll.
- b) Perbankan
- i. Relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM;
 - ii. Restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM.
- 3). Kebijakan Segi Penawaran.

Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (*incomes policy*), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan.

Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada (i) meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan (ii) meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya.

Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam (i) pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam (ii) pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan

yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksi.

Disamping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara: mengembangkan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.

1.3. Soal Latihan/Tugas

1. Apakah yang dimaksud dengan teori makro ekonomi?
2. Sebutkan masalah utama dalam makro ekonomi!
3. Apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto?
4. Mengapa pengangguran sebagai salah satu masalah dalam makro ekonomi?
5. Sebutkan bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi!

BAB 2

PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

2.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami pengertian pendapatan nasional dan mampu menghitung pendapatan nasional.

2.2. Uraian Materi

A. Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Sukirno (2016:36) Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Menurut Latumaerissa (2015:17) Pendapatan Nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku.

Pendapatan Nasional menurut Badan Pusat Statistik (2021:6-7) diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pendapatan yang diterima masyarakat bukan hanya merujuk pada upah dan gaji, melainkan berupa pendapatan faktor produksi. Pendapatan faktor produksi merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran dalam wujud balas jasa tenaga kerja (seperti upah atau gaji) dan bukan tenaga kerja (seperti bunga, dividen, royalti, dan kompensasi atas kepemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup masyarakat. Apabila produk yang dihasilkan dalam perekonomian dikaitkan pola dan perilaku konsumsi masyarakat; maka pendapatan nasional dapat menjadi proksi atas ukuran kemakmuran.

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang berperan penting menggambarkan keterkaitan kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara dengan kondisi perekonomian. Hal ini digambarkan melalui kemampuan menghasilkan berbagai produk, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi, serta menambah aset yang dimiliki masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional menunjukkan pendapatan potensial yang dapat diterima masyarakat sesuai dengan sumber pendapatan. Pada kenyataannya, pendapatan yang dihasilkan suatu negara belum tentu sepenuhnya dinikmati masyarakat negara tersebut. Ada pendapatan yang mengalir ke luar wilayah suatu negara dan ada yang diterima dari negara lain. Oleh karena itu, konsep pendapatan nasional menjelaskan pendapatan dari seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima masyarakat residen, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik dan luar negeri dikurangi dengan pembayaran atas masyarakat non residen.

B. Tiga Cara Penghitungan Pendapatan Nasional

Sukirno (2016:34) menyebutkan, untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh perekonomian, dapat dilakukan tiga cara penghitungan, yaitu cara pengeluaran, cara produksi dan cara pendapatan. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai.

Cara Penghitungan I: Cara Pengeluaran

Menurut Sukirno (2016:37) penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah dengan membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada empat komponen, yaitu: konsumsi rumah

tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Menurut Rahardja (2004:213) dalam metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran, yaitu:

$$PDB = C + G + I + (X - M)$$

dimana: C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor

Cara Penghitungan II: Cara Produk Neto

Menurut Sukirno (2016:42) Produk netto (*net output*) berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Cara menghitungnya dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian.

Menurut Rahardja (2004:208) cara penghitungan dengan metode output atau metode produksi, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktek adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (*industrial origin*). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah *output* seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa *output* yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari *output* sektor lain. Atau bisa juga merupakan *input* bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*) atau bahkan *multiple counting*. Akibatnya, angka PDB bisa menggelembung

beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarkan hal di atas, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai *output* dengan nilai *input* antara.

$$NT = NO - NI$$

dimana: NT = nilai tambah

NO = nilai *output*

NI = nilai *input* antara

Cara Penghitungan III: Cara Pendapatan

Menurut Sukirno (2016:45) apabila faktor-faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut, akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional lain, yang berbeda dengan yang diperoleh dalam penghitungan pendapatan nasional dengan kedua cara lainnya. Pendapatan nasional itu dinamakan Pendapatan Nasional atau Produk Nasional Neto menurut harga faktor.

Menurut Raharja (2004:211) metode pendapatan memandang nilai *output* perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat *output* dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi:

$$Q = f(L, K, U, E)$$

dimana: Q = *output*

L = tenaga kerja

K = barang modal

U = uang/*financial*

E = kemampuan *entrepreneur* atau kewirausahaan

Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN)

$$PN = w + i + r + \pi$$

dimana: w = upah/gaji

i = pendapatan bunga

r = pendapatan sewa

π = keuntungan

C. Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif

Tujuan perhitungan *output* maupun pengeluaran dan ukuran-ukuran agregat lainnya adalah untuk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki/meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat. Beberapa pengertian berkaitan dengan hal tersebut, adalah:

1) Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Produk Domestik Bruto menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut *output*-nya diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya *output* yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik.

2) Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian disebut sebagai Produk Nasional Bruto. Kelemahan perhitungan PDB dapat dikoreksi dengan mengurangi nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor

produksi yang berasal dari luar perekonomian. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa PDB tidak memperhatikan produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi milik domestik (perekonomian) yang berada di luar perekonomian itu sendiri (berada di luar negeri). Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berada di luar negeri harus ditambahkan. Angka yang dihasilkan dari penjumlahan dan pengurangan terhadap PDB merupakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product*.

3) Produk Nasional Neto (*Net National Product*)

Untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal (*capital goods*). Itulah sebabnya sektor perusahaan (dunia usaha) harus melakukan investasi. Tujuan investasi tersebut adalah mengganti barang modal yang sudah aus (*using*) dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimasukkan adalah total pengeluaran investasi bruto. Padahal yang lebih relevan adalah investasi neto, yaitu investasi bruto dikurangi depresiasi. Produk Nasional Neto (PNN) dihasilkan dari PNB dikurangi depresiasi.

4) Pendapatan Nasional (*National Income*)

Ketika membahas *output* nasional dengan metode pendapatan, telah dikatakan bahwa Pendapatan Nasional (PN) merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN dari PNN, kita harus mengurangi PNN dengan angka pajak tidak langsung (PTL) dan menambahkan angka subsidi (S). Pajak tidak langsung harus dikurangkan, karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Sedangkan subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi, tetapi tidak masuk dalam perhitungan PNN.

5) Pendapatan Personal (*Personal Income*)

Pendapatan personal adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh angka PP dari PN, maka laba perusahaan yang tidak dibagikan (*retained earnings*) harus dikurangkan, sebab Laba Tidak Dibagikan (LTB) merupakan hak perusahaan. Selain LTB, Pembayaran Asuransi Sosial (PAS) atau *social insurance payments* juga harus dikurangkan. Kedua pengurangan ini belum memberikan informasi yang sebenarnya tentang pendapatan personal. Sebab pendapatan personal bukan saja diterima karena balas jasa atas kesediaan bekerja (upah, gaji) ataupun pendapatan non upah yang diperoleh dari sektor perusahaan, tetapi juga pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen (PIGK) atau *personal interest income received from government and consumers* dan Pendapatan Non-Balas Jasa (PNBJ) atau *transfer payment to persons*.

6) Pendapatan Personal Disposabel (*Disposable Personal Income*)

Pendapatan Personal Disposabel (PPD) adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi Pajak Atas Pendapatan Personal (PAP) atau *personal taxes*.

Dari Produk Domestik Bruto sampai ke Pendapatan Personal Disposabel dapat diringkas sebagai berikut:

$C + G + I + (X - M)$	=	Produk Domestik Bruto (PDB)
Ditambah	:	Pendapatan Faktor Produksi Domestik Yang Ada Di Luar Negeri
Dikurang	:	Pembayaran Faktor Produksi Luar Negeri Yang Ada Di Dalam Negeri
	=	Produk Nasional Bruto (PNB)

Dikurang	: Penyusutan	
	=	Produk Nasional Neto (PNN)
Dikurang	: Pajak Tidak Langsung	
Ditambah	: Subsidi	
	=	Pendapatan Nasional (PN)
Dikurang	: Laba Ditahan	
Dikurang	: Pembayaran Asuransi Sosial	
Ditambah	: Pendapatan Bunga Personal dari Pemerintah dan Konsumen	
Ditambah	: Penerimaan Bukan Balas Jasa	
	=	Pendapatan Personal
Dikurang	: Pajak Pendapatan Personal	
	=	Pendapatan Personal Disposabel

Contoh Perhitungan Pendapatan Nasional (Dinyatakan dalam jutaan rupiah) (Dikbud, 2017)

I. Produk Domestik Bruto (PDB)	Rp	47.500,00
Dikurangi: Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri	Rp	7.500,00
II. Produk Nasional Bruto (PNB)	Rp	40.000,00
Dikurangi: Penyusutan Barang Modal	Rp	10.000,00
III. Produk Nasional Neto (Net National Product = NNP)	Rp	30.000,00
Dikurang: Pajak Tidak Langsung	Rp	6.000,00
IV. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income = NNI)	Rp	24.000,00
Ditambah: Transfer Payment	Rp	1.000,00
Dikurangi: a. Laba yang ditahan	Rp	500,00
b. Pajak Perseroan	Rp	2.000,00
c. Jaminan Sosial	Rp	500,00
	Rp	3.000,00
V. Personal Income (PI)	Rp	20.000,00
Dikurangi: Pajak Langsung	Rp	2.000,00
VI. Pendapatan Bebas (DI)	Rp	18.000,00
Dikurangi: Tabungan/Saving	Rp	2.000,00
Tingkat Konsumsi	Rp	16.000,00

2.3. Soal Latihan/Tugas

1. Jelaskan pengertian pendapatan nasional!
2. Berapa cara penghitungan pendapatan nasional?
3. Jelaskan masing-masing cara penghitungan pendapatan nasional!
4. Jelaskan perbedaan PDB dengan PNB!
5. Negara A bermaksud untuk menghitung besarnya pendapatan nasional negara tersebut dengan menggunakan pendekatan pengeluaran.

Diketahui beberapa data dari negara A sebagai berikut: (dalam milyar rupiah)

- Sewa tanah: Rp 33.000
- Konsumsi: Rp 78.500
- Upah: Rp 47.500
- Pengeluaran pengusaha: Rp 36.300
- Ekspor: Rp 17.700
- Impor: Rp 9.100
- Keuntungan: Rp 8.600
- Ekspor netto Rp 8.600
- Pengeluaran pemerintah: Rp 33.000

Berapa besarnya pendapatan nasional negara A tersebut?

BAB 3

PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI: PANDANGAN KLASIK, KEYNES DAN PENDEKATAN MASA KINI

3.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami penentuan kegiatan ekonomi dari teori pandangan Klasik, Keynes dan pendekatan masa kini.

3.2. Uraian Materi

A. Pandangan Ahli Ekonomi Klasik

Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi Klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan kata lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan.

Keyakinan ahli-ahli ekonomi Klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan, dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean Baptiste Say (1767-1832), seorang ahli ekonomi Klasik bangsa Perancis. Ia mengatakan, “Penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya” atau *“supply creates its own demand”*.

Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi, apabila hal itu terjadi, adalah masalah sementara. Mekanisme pasar akan membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya

jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor dimana permintaan terhadap produksi mereka sangat berlebihan.

Berdasarkan pada pandangan seperti ini, ahli-ahli ekonomi Klasik berkeyakinan bahwa di dalam suatu perekonomian sering kali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian (penawaran agregat) pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut (permintaan agregat) yang sama besarnya. Oleh karenanya permintaan tidak akan berlaku.

Menurut Pujiati (2011:116), ada beberapa ilmuwan dalam pemikiran ekonomi Kaum Klasik, yaitu:

- 1) Adam Smith, menyebutkan asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar.
- 2) Jean Batiste Say menyebutkan, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi “produksi berlebihan” yang sifatnya menyeluruh, begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas.
- 3). Thomas Robert Malthus. pemikirannya tentang teori sewa tanah dan teori tentang penduduk. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung.
- 4) Ricardo. Mengembangkan teori tentang empat kelompok permasalahan yaitu:
 - i. Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba,
 - ii. Teori tentang nilai dan harga,

- iii. Teori tentang perdagangan internasional dan,
- iv. Teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

B. Kritik Keynes Terhadap Pandangan Klasik

Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori Klasik, yaitu penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat: penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi Klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat dalam dua persoalan berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam perekonomian.
- 2) Sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha.

Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Pandangan Klasik menyebutkan jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan Ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes tentang sifat tabungan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi Y_0 masyarakat menabung sebagian pendapatannya.
- 2) Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat.

Perbedaan penentuan investasi. Pandangan Klasik menyebutkan bahwa tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga, dan perubahan-perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Pandangan Keynes menyebutkan, jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha tidak sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga.

Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Tetapi di samping faktor itu terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan, dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah menggalakkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuannya yang maksimal.

Perbedaan penentuan suku bunga. Pandangan Klasik menyebutkan, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai.

Pandangan Keynes menyebutkan, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan

oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang akan menentukan suku bunga.

Perbedaan tingkat upah. Pandangan Klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar.

Pandangan Keynes menyebutkan tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran menjadi lebih sukar untuk dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuk menjaga para pekerja agar diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan.

C. Pendekatan Terkini Dalam Penentuan Kegiatan Perekonomian

Ada empat pemikiran untuk analisis makro ekonomi sesudah masa golongan Keynesian, yaitu:

- 1) Golongan Monetaris, oleh: Milton Friedman;
- 2) Golongan Ekspektasi Rasional (Klasik Baru);
- 3) Ekonomi Segi Penawaran (Supply Side Economics);
- 4). Golongan Keynesian Baru.

Golongan Monetaris menyatakan, bahwa sistem pasar bebas cukup efisiensi dalam mengatur kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh. Menunjukkan peranan penawaran

uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga.

Menurut Pujiati (2011:118) tokoh-tokoh Monetarist adalah Friedrich von Hayek dan Milton Friedman. Kedua tokoh menyebutkan, pentingnya laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi, Friedman sangat anti dengan peran pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian.

Golongan Monetaris, mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut:

- i. Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi.
- ii. Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Friedman mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peranan pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi.
- iii. Mengenai bentuk kebijakan pemerintah-apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal-yang ditekankan golongan Keynesian, tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian.

Golongan Ekspektasi Rasional (Klasik Baru), didasarkan kepada dua premisalan penting, yaitu:

- i. Teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai

informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Akibatnya: mengembangkan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya.

- ii. Semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Akibatnya: perekonomian selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kebijakan diskresioner pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter) tidak akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Ekonomi Segi Penawaran (*Supply Side Economics*). Kebijakan Ekonomi Segi Penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan, pendapatan nasional riil dan kesempatan kerja bertambah dan tingkat harga dapat distabilkan.

Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan berikut :

- 1) Para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien;
- 2) Efisiensi kegiatan usaha dapat di tingkatkan dan biaya produksi dikurangi;
- 3) Mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan.

Tujuan-tujuan di atas dicapai dengan cara:

- 1) Mengurangi pengeluaran pemerintah;

- 2) Menurunkan tingkat pajak yang dipungut terutama pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi;
- 3) Penswastaan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat; dan
- 4) Mendorong persaingan yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor.

Golongan Keynesian Baru. Golongan Keynesian Baru adalah segolongan ahli ekonomi yang masih belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynes yang utama.

- 1) Pasaran tenaga kerja bukanlah pasaran persaingan sempurna.
- 2) Apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja tidak sempurna, dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh.

Berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh.

3.3. Soal Latihan/Tugas

1. Sebutkan dan jelaskan kegiatan ekonomi!
2. Sebutkan ahli ekonomi Klasik!

3. Siapa ahli ekonomi Klasik yang mengeluarkan pemikirannya tentang penawaran dan permintaan, sebutkan hasil pemikirannya!
4. Sebutkan perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi Klasik!
5. Jelaskan kritikan Golongan Monetaris terhadap pandangan Keynes!

BAB 4

KESEIMBANGAN EKONOMI DUA SEKTOR

4.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami keseimbangan ekonomi dua sektor dan konsep-konsep di dalam ekonomi dua sektor.

4.2. Uraian Materi

A. Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor

Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Perekonomian dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.

Aliran pendapatan yang terdapat dalam “perekonomian” memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga dan untung.
- 2). Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan.
- 3) Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan.

- 4) Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan.

Menurut Karya dan Syamsuddin (2016:101) terdapat dua arus lingkaran yang akan menimbulkan dua pasar faktor produksi dan pasar barang. Yang pertama, sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan dan sebagai balasannya sektor perusahaan akan menerima uangnya. Dalam hal ini sektor rumah tangga sebagai pembeli dan sektor perusahaan sebagai penjual, berproses membentuk pasar barang. Kedua, sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga dan sebagai imbalannya sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah dan bunga. Dalam hal ini perusahaan sebagai pembeli dan sektor rumah tangga.

B. Hubungan Antara Konsumsi Dan Pendapatan

Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga (unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi). Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga.

Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar (skedul) konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dapat dilihat dalam Tabel 4.1, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp 500.000, konsumsinya adalah Rp 500.000. Pada waktu pendapatannya Rp 900.000, konsumsinya adalah Rp 800.000. Tabel 4.1 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga.

TABEL 4.1

PENDAPATAN, KONSUMSI DAN TABUNGAN (DALAM RIBU RUPIAH)

Pendapatan disposebel (Y_0)	Pengeluaran konsumsi (C)	Tabungan (S)
(1)	(2)	(3)
0	125	-125
100	200	-100
200	275	-75
300	350	-50
400	425	-25
500	500	0
600	575	25
700	650	50
800	725	75
900	800	100
1000	875	125

Dalam kolom (1) ditunjukkan berbagai tingkat pendapatan disposebel yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga, sedangkan dalam kolom (2) ditunjukkan berbagai jumlah pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Jumlah tabungan (atau kelebihan pendapatan sesudah melakukan pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya) ditunjukkan dalam kolom (3).

Contoh angka yang dibuat dalam Tabel 4.1 adalah contoh yang memberikan gambaran mengenai ciri-ciri khas dari hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposebel seperti yang baru diterangkan di atas.

Ciri-ciri yang digambarkan dalam Tabel 4.1 adalah:

- 1) Pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan.

Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan disposable adalah nol ($Y_d = 0$), pengeluaran konsumsi adalah Rp 125 ribu. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Tabungan negatif, atau mengorek tabungan (dissaving) akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatannya masih di bawah Rp 500 ribu.

- 2) Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi.

Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi.

- 3) Contoh dalam Tabel 4.1 menunjukkan, apabila pendapatan bertambah sebanyak Rp 100 ribu, konsumsi bertambah sebanyak Rp 75 ribu. Sisa pertambahan pendapatan itu (Rp 25 ribu) ditabung.

- 4) Pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung.

Disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi maka pada akhirnya rumah tangga tidak “mengorek tabungan” lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Contoh dalam Tabel 4.1 menunjukkan, apabila pendapatan rumah tangga lebih daripada Rp 500 ribu, konsumsinya lebih rendah dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan Rp 900 ribu, konsumsi adalah Rp 800 ribu, dan ini menunjukkan rumah tangga sudah menabung sebanyak Rp 100 ribu.

C. Kecondongan Mengkonsumsi dan Menabung

Kecondongan mengkonsumsi, ada dua, yaitu:

- 1) Kecondongan mengkonsumsi marjinal;
- 2) Kecondongan mengkonsumsi rata-rata.

Kecondongan menabung, ada dua yaitu:

- 1) Kecondongan menabung marjinal;
- 2) Kecondongan menabung rata-rata.

Kecondongan Mengkonsumsi

- 1) Kecondongan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*=MPC).

yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (Δy_d) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta y_d}$$

- 2) Kecondongan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume*=APC).

Yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposebel ketika konsumsi tersebut dilakukan (y_d). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$APC = \frac{C}{y_d}$$

Kecondongan Menabung

- 1) Kecondongan menabung marjinal (*Marginal Propensity to Save* = MPC).

yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan (ΔS) dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔY_d). Nilai MPS dapat dihitung dengan formula:

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y_d}$$

- 2) Kecondongan menabung rata-rata (Average Propensity to Save = APS).

Yaitu perbandingan di antara tabungan (S) dengan pendapatan disposebel (Y_d).

Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$APC = \frac{S}{Y_d}$$

D. Fungsi Konsumsi Dan Fungsi Tabungan

Dalam analisis makro ekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian dalam melakukan konsumsi dan tabungan analisis makro ekonomi selalu melihat ciri-cirinya dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional.

- 1) Fungsi Konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut.
- 2) Fungsi Tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut.

E. Penentu-Penentu Lain Konsumsi Dan Tabungan

1) Kekayaan yang telah terkumpul

Seandainya saja seseorang sudah memiliki kekayaan yang banyak, tentu dia akan tidak segiat menabung dengan yang belum memiliki kekayaan yang banyak. Contoh, memiliki harta warisan yang sangat banyak dan tidak habis-habis. Kekayaan ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsinya, konsumsi meningkat karena memiliki kekayaan, menurut Veritia dan kawan-kawan (2019:65).

2) Suku bunga

Suku bunga bisa dilihat juga dari pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Seseorang akan banyak menabung jika suku bunga tinggi, namun sebaliknya akan mengurangi menabung jika suku bunga rendah. Pada suku bunga rendah, justru rumah tangga cenderung menambah pengeluaran konsumsinya.

3) Sikap berhemat

Tiap individu masyarakat memiliki sikap yang berbeda-beda terkait menabung dan konsumsi. Ada yang tidak suka belanja berlebih-lebihan namun adajuga yang sebaliknya.

4) Keadaan perekonomian

Perekonomian yang kuat pasti tidak memiliki pengangguran, masyarakat cenderung aktif menggunakan uangnya untuk kegiatan ekonomi. Ketika keadaan ekonomi suatu negara kuat, maka akan banyak masyarakat yang mengeluarkan uangnya untuk berbelanja, namun ketika keadaan ekonomi kurang baik, masyarakat akan mulai berhati-hati dan menabung.

5) Distribusi pendapatan

Pada masyarakat distribusi pendapatan tidak merata, ada yang berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah. Pada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi tentu bisa menabung, namun sebaliknya yang rendah masih sulit untuk menabung. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecenderungan konsumsi yang tinggi.

6) Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi

Beberapa negara, terutama negara maju memiliki program dana pensiun yang cukup tinggi bagi masyarakatnya. Apabila pendapatan pensiun besar jumlahnya, umumnya pekerja menjadi tidak terdorong untuk menabung yang banyak, dan ini akan menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan dana pensiun tidak mencukupi, mereka akan lebih giat bekerja dan menabung untuk masa tua mereka.

4.3. Soal Latihan/Tugas

1. Jelaskan pengertian perekonomian dua sektor!
2. Sebutkan ciri-ciri aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua sektor!
3. Jelaskan dua arus lingkaran yang akan menimbulkan dua pasar faktor produksi dan pasar barang!
4. Jelaskan kecenderungan konsumsi marjinal!
5. Jelaskan fungsi konsumsi!

BAB 5

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR

5.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami keseimbangan ekonomi tiga sektor dan konsep-konsep di dalam ekonomi tiga sektor.

5.2. Uraian Materi

A. Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor

Perekonomian Tiga Sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut: rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu:

- 1) Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga.
- 2) Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.

Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup.

Karya & Syamsuddin (2016:116) menyatakan bahwa terdapat tiga sektor ekonomi yang aktif dalam aktivitas ekonomi:

- 1) Sektor rumah tangga (*Personal Sectors*)
- 2) Sektor swasta/ perusahaan (*Business sectors*)
- 3) Sektor Pemerintah (*Government sectors*)

Melalui pendekatan pengeluaran, maka pendapatan nasional dapat ditulis persamaannya:

$$\text{GNP} = C + I + G \text{ atau } Y = C + I + G$$

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian mampu mempengaruhi keseimbangan perekonomian. Pemerintah dalam usaha memperoleh pendapatannya terutama melalui kebijakan pemungutan pajak baik terhadap rumah tangga atau perusahaan. Pajak yang dipungut dapat secara bertahap atau pun proporsional. Dampak pemungutan pajak adalah:

- 1) Pajak yang dipungut pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga.
- 2) Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang kemudian juga digunakan untuk pembelanjaan, yang selanjutnya akan menaikkan penerimaan agregat.

B. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan

Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah.

1) Aliran Pendapatan Dan Pengeluaran

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah:

- a) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama.

- b) Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang & jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan.
- c) Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

Gambar 5.1
Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Tiga Sektor



Sumber: Sukirno (2016:152)

Dari Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokok aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai

pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.

- b) Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
- c) Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang & jasa.

Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), di simpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T), dalam persamaan: $Y = C + S + T$.

Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal.

Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan investasi (I) sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G), dalam persamaan $AE = C + I + G$.

2) Syarat Keseimbangan

Total pengeluaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh berbagai pihak dalam ekonomi terdiri dari tiga jenis pengeluaran: konsumsi rumah tangga (C), investasi bisnis (I) dan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (G). Dengan demikian, kondisi yang menciptakan keseimbangan dalam

ekonomi tiga sektor adalah penawaran agregat = pengeluaran agregat ($Y = AE$)

atau:

$$Y = C + I + G$$

Aktivitas perusahaan dalam pembuatan barang dan jasa menghasilkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga (upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan) sama dengan pendapatan nasional (Y). Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga digunakan untuk tiga tujuan: konsumsi (C), tabungan (S) dan pajak (T). Berdasarkan aliran pendapatan yang memanifestasikan diri dalam tiga sektor ekonomi, kesamaan berikut:

$$Y = C + S + T$$

Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut : $Y = C + I + G$. sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan $Y = C + S + T$. dengan demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut:

$$C + I + G = C + S + T$$

Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka:

$$I + G = S + T$$

Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan berikut :

$$Y = C + I + G,$$

dan

$$I + G = S + T$$

C. Jenis-jenis Pajak

Dalam setiap kegiatan perekonomian, pemerintah melakukan berbagai jenis perbelanjaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam administrasi pemerintah, pembangunan, perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Karenanya pemerintah memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari pungutan pajak dari masyarakat dan rumah tangga.

Pajak Langsung yaitu pungutan pemerintah yang langsung diperoleh dari wajib pajak yang membayar pajak yaitu penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak individu dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud pajak tak langsung yaitu pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain, seperti pajak impor. Perusahaan yang mengimport barang, maka beban pajak importnya merupakan beban bagi perusahaan. Akan tetapi, pada saat penjualan barang tersebut biaya pajak akan dibebankan kepada para konsumen melalui penentuan harga jual barang.

D. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan

Pajak Regresif adalah sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Contohnya adalah pajak impor dan pajak penjualan.

Pajak Proporsional adalah persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan.

Pajak Progresif adalah sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Disamping itu sistem ini bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan.

E. Efek Pajak Ke Atas Konsumsi dan Tabungan

Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga, baik bersumber dari upah/gaji, sewa, bunga dan masih berupa pendapatan kotor. Pendapatan ini akan berkurang setelah dikenakan pajak (T_x). Yang dimaksudkan dengan pendapatan dalam pernyataan ini adalah pendapatan *earned income* yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan untuk terlibat membentuk produksi nasional.

Dalam perekonomian tertutup yang menggunakan kebijaksanaan perpajakan dengan sistem pajak sederhana, yaitu sistem yang memberlakukan penetapan pajak tidak ditentukan oleh salah satu atau beberapa variabel yang dianalisis.

Dengan diberlakukannya kebijaksanaan fiskal, sudah tentu pendapatan masyarakat (rumah tangga) akan berkurang. Dengan kata lain untuk kebutuhan konsumsi dan tabungan rumah tangga tidak lagi ditentukan secara langsung oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional sebagai pendapatan, akan tetapi ditentukan oleh besarnya pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan. Pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan adalah hasil pengurangan pendapatan nasional dari rumah tangga dengan pajak atau disebut dengan *disposable income* (Y_d).

Hubungan antara pendapatan disposable (Y_d) dan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian, dinyatakan dengan persamaan berikut ini:

$$Y_d = Y - T$$

Dimana: Y_d = Pendapatan Disposebel

Y = Pendapatan Nasional

T = Pajak

Dari rumus di atas, maka pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebesar pajak yang dipungut. Dengan penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan.

F. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Bagian dari pengeluaran negara digunakan untuk membiayai administrasi negara dan bagian lain untuk membiayai kegiatan pembangunan. Membayar gaji kepada pegawai pemerintah, membiayai sistem Pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai pengeluaran militer, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur kritis.

Jumlah belanja publik selama periode waktu tertentu tergantung pada banyak faktor. Faktor yang menentukan adalah tarif pajak, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang serta pertimbangan politik dan keamanan.

Taksiran jumlah pajak untuk penyusunan anggaran negara harus terlebih dahulu mencakup taksiran jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin banyak pajak dikumpulkan, semakin banyak pengeluaran pemerintah akan dilakukan.

Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah sangat penting bagi perekonomian. Kegiatan dapat memanipulasi kegiatan ekonomi ke arah yang

diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan negara ini adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pertimbangan kebijakan politik dan stabilitas suatu negara selalu menjadi salah satu tujuan terpenting dalam penyusunan anggaran negara. Keresahan politik dan bentrokan antar kelompok orang sering terjadi di berbagai negara di dunia. Situasi ini akan mengarah pada peningkatan pengeluaran pemerintah yang sangat tajam, terutama ketika operasi militer harus dilakukan.

G. Masalah Makro Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan fiskal. Dalam usaha untuk menunjukkan konsumsi kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, bagian ini akan menerangkan dua hal berikut

- 1) Menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian.
- 2) Menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner atau *discretionary fiscal policy*. Ia dapatlah diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pakaknya dengan tujuan untuk:

- 1) Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.
- 2) Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tingkat menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Dari penjelasan dari kebijakan fiskal diskresioner ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut:

- 1) Membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluarannya;
- 2) Membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.

Pada kakikatnya kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan didalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah.
- 2) Membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak.
- 3) Serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pungutan pajak.

5.3. Soal Latihan/Tugas

1. Jelaskan perekonomian tiga sektor!
2. Jelaskan campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional!
3. Sebutkan tiga sektor ekonomi yang aktif dalam aktivitas ekonomi!
4. Apa dampak pemungutan pajak?
5. Apa perbedaan pajak langsung dengan pajak tidak langsung?

BAB 6

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TERBUKA

6.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami keseimbangan ekonomi empat sektor dan konsep-konsep di dalam ekonomi empat sektor.

6.2. Uraian Materi

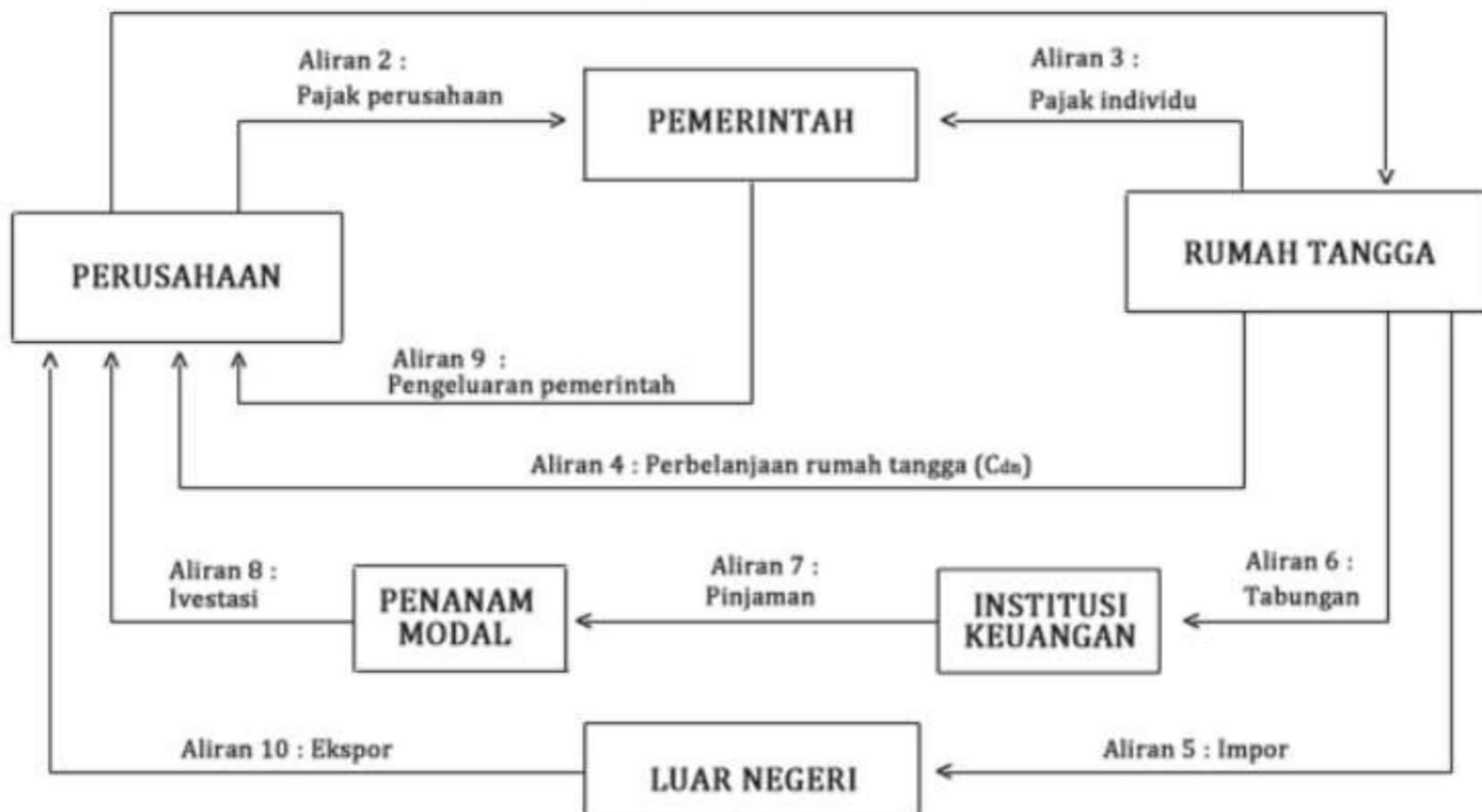
A. Sirkulasi Aliran Pendapatan Ekonomi Terbuka

Dalam perekonomian terbuka, sirkulasi perekonomian berasal dari empat golongan, yaitu: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Perdagangan internasional sangat lazim dilakukan oleh berbagai negara untuk memenuhi kekurangan variasi dalam konsumsi dalam negeri

Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan Aliran 3.
- 2) Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh Aliran 4.
- 3) Mengimpor barang-barang yang diproduksi dinegara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5.
- 4) Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan dan institusi penabung lainnya. Penyimpanan ini ditunjukkan oleh aliran 6.

Gambar 6.1
Aliran 1. Pendapatan Faktor-Faktor Produksi



Sumber: Sukirno (2016:204)

Dari Gambar 6.1 dapat diketahui Sirkulasi Aliran Pendapatan yang berlaku dalam Sistem Ekonomi terbuka empat sektor:

Aliran 1. Upah/gaji, sewa, bunga dan laba merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa faktor produksi (tenaga kerja, alam, modal & entrepreneur) yang disumbangkan ke sektor perusahaan.

Aliran 2. pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan.

Aliran 3. Rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposibel, sebagai pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan.

Aliran 4. Pembayaran rumah tangga (C) karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri.

Aliran 5. Sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri (impor) sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang/jasa mengalir ke luar negeri.

Aliran 6. Sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi ditabungkan (S) ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Selanjutnya lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan.

Aliran 7. Investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan, tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut.

Aliran 8. Dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor.

Aliran 9. Pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan, selanjutnya pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah.

Aliran 10. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri dapat diekspor keluar negeri sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut.

Aliran 11. Sebagai usaha mensejahterakan masyarakat, pihak pemerintah juga melakukan pembayaran transfer (Tr) ke sektor rumah tangga, sehingga bantuan tanpa imbalan jasa ini merupakan bagian penerimaan rumah tangga yang menambah pendapatan disposable.

Berdasarkan aliran pengeluaran di Gambar 6.1, disimpulkan:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri (Cdn);

- 2) Investasi perusahaan (I) untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa;
- 3) Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri (G).
- 4). Ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri (X);
- 5) Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri (M).

Dengan demikian komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah: pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri (ekspor). Pengeluaran agregat tersebut (AE) dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut:

$$AE = Cdn + I + G + X + M$$

B. Syarat Keseimbangan Perekonomian Terbuka

Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang: (i) yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional (Y), dan (ii) yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional (Y) dan impor (M), dalam formula:

$$AS = Y + M$$

Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat (AE) meliputi lima komponen berikut: pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri (Cdn), investasi swasta (I),

pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan pengeluaran ke atas impor (M), dalam persamaan:

$$AE = C_{dn} + I + G + X + M$$

Dalam Gambar 6.1 ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut:

$$C = C_{dn} + M$$

Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi:

$$AE = C + I + G + X$$

Di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian (apakah ia terdiri dari dua sektor, tiga sektor atau empat sektor) keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat (AS) sama dengan pengeluaran agregat (AE). Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila:

$$Y + M = C + I + G + X$$

Atau:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dalam pendekatan suntikan-bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut:

$$I + G + X = S + T + M$$

Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka.

Gambar 6.1. Aliran 1 pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional (Y) yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan (Aliran 2). Seterusnya, pendapatan

nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu (Aliran 3). Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposebel (Y_d), dalam formula:

$$Y_d = Y - \text{Pajak Perusahaan} - \text{Pajak Individu}$$

Atau:

$$Y_d = Y - T$$

Seterusnya, pendapatan disposebel tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

- i) Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Dalam persamaan: $C = C_{dn} + M$.
- ii) Untuk ditabung, yaitu sebanyak S .

Berdasarkan kepada (i) dan (ii) maka $Y_d = C + S$. Oleh karena $Y_d = Y - T$, maka perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut:

$$Y - T = C + S$$

Atau:

$$Y = C + S + T$$

Dimana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor.

Uraian mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut:

$$C + I + G + (X - M) = C + S + T$$

Atau:

$$I + G + X = S + T + M$$

C. Penentu Ekspor Dan Impor

1) Faktor-Faktor Yang Menentukan Ekspor

Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Mutu dan harga barang yang di ekspor haruslah bisa sebaiknya mengimbangi produk-produk di pasaran luar negeri sehingga berpotensi untuk diserap pangsa luar negeri.

2) Faktor-Faktor Yang Menentukan Impor

Pandangan bahwa dalam praktiknya hanya rumah tangga pribadi yang membeli barang dari luar negeri. Banyak barang yang diproduksi di luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama: menggunakan barang-barang konsumsi dan barang modal impor. Namun, analisis makroekonomi mengasumsikan bahwa impor terutama dari rumah tangga swasta. Oleh karena itu, fungsi impor terkait erat dengan pendapatan nasional, dengan fungsi impor menjadi grafik yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dibuat dan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Keseimbangan makroekonomi adalah keseimbangan yang dicapai dalam ekonomi empat sektor. Yaitu, bentuk ekonomi secara teori, yang mendekati situasi ekonomi aktual. Dalam neraca ini, pendapatan nasional yang

diperoleh perusahaan sama dengan total pengeluaran dibandingkan pendapatan nasional. Dalam formula, prasyarat untuk mencapai keseimbangan makroekonomi adalah $Y = C + I + G + (X - M)$.

D. Multiplier Dalam Perekonomian Terbuka

Secara definisi, multiplier adalah rasio diantara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Walau bagaimanapun multiplier dalam ekonomi empat sektor adalah lebih kecil daripada multiplier dalam ekonomi dua sektor dan tiga sektor. Karena wujudnya satu bocoran baru dalam perekonomian, yaitu impor, yang dinilainya dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

6.3. Soal Latihan/Tugas

1. Sebutkan asal sirkulasi perekonomian terbuka!
2. Mengapa perekonomian empat sektor disebut perekonomian terbuka?
3. Jelaskan penggunaan pendapatan rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi!
4. Sebutkan komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka!
5. Jelaskan faktor-faktor yang menentukan ekspor!

REFERENSI

- BPS. (2021). *Pendapatan Nasional Indonesia 2016-2020*. BPS RI.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmNiMDY0MzBhNzA3MjI2YmZmOWY4ZDk5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDYvMDgvYmNiMDY0MzBhNzA3MjI2YmZmOWY4ZDk5L3BlbmRhcGF0YW4tbmFzaW9uYWwtaW5kb25lc2lhLTIwMTYtMjAyMC5odGls&twoadfn>
- Dikbud, P. N. (2017). *Media Pembelajaran Untuk SMA, SMK & SMALB, IPS-Ekonomi*.
[https://dikbud.ntbprov.go.id/assets/download/mediapembelajaran/Ekonomi 5 \(Pendapatan Nasional\).pdf](https://dikbud.ntbprov.go.id/assets/download/mediapembelajaran/Ekonomi%20(Pendapatan%20Nasional).pdf)
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). *Macroeconomics* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Indrawati, S. M. (2020). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.”*
https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/kem/2021/files/kem_ppkf_2021.pdf
- Isep, V. I. S. (2019). *Teori Ekonomi Makro* (Cetakan Pe). Unpam Press.
[http://eprints.unpam.ac.id/8564/2/SMJ0133_MODUL UTUH_TEORI EKONOMI MAKRO %283%29.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8564/2/SMJ0133_MODUL%20UTUH_TEORI%20EKONOMI%20MAKRO%283%29.pdf)
- Kalsum, U. (2017). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 87–94.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v17i1.1183>
- Karya, Detri & Syamsuddin, S. (2016). *Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen* (Edisi satu). Rajawali Press.
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media.
- Pujiati, A. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–124. <https://www.neliti.com/publications/24459/menuju-pemikiran-ekonomi-ideal-tinjauan-filosofis-dan-empiris>
- Rahardja, P. M. M. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Revisi). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saleh, M. S. S. (2015). *Pengantar Ekonomi Makro*. UPT Penerbitan Universitas Jember.
[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79739/M. Saleh_Ekonomi Makro_Buku.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79739/M.%20Saleh_Ekonomi%20Makro_Buku.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (C. ke-24. Edisi Ketiga (ed.)). Rajawali Pers.